

# ***Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar**

Aco Nata Saputra<sup>1</sup>, Andi Nur Fiqhi Utami<sup>2</sup>, Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah<sup>3</sup>, Citra.<sup>4</sup> Fariaty<sup>5</sup>, Ahmad Amiruddin<sup>6</sup>

## **ABSTRAK**

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana berlangsungnya proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologi untuk menemukan fakta dan hasil di lapangan. Kolaborasi pemerintah terbagi menjadi 3 proses yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, dan dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tehnik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Hasilnya menunjukkan bahwa (1)Dinamika kolaborasi ada aspek motivasi yang meliputi kepercayaan dan pemahaman bersama. Terbangun kepercayaan antara pelaksana proses kolaborasi antara DISPOP dengan pihak asosiasi usaha pariwisata, kepercayaan juga terwujud dari ada sikap dan sifat menghargai antara pelaksana kolaborasi. Untuk pemahaman bersama terlihat dalam bagaimana pelaksana kolaborasi memahami tugas dan fungsi utama dalam pengelolaan pariwisata. Sedangkan pada aspek prinsip bersama DISPOP dengan pihak asosiasi usaha pariwisata mengembangkan prinsip pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. (2)Tindakan-tindakan kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar dalam memfasilitasi kolaborasi belum maksimal karena keterbatasan anggaran yang dimiliki, tetapi itu tidak dapat menjadi alasan terhambatnya tindakan kolaborasi. Sedangkan untuk memajukan proses kolaborasi sangat terlihat dalam pola komunikasi aktif yang dibangun antara DISPOP dengan pihak asosiasi usaha pariwisata. (3)Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi pengelolaan pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar sudah dapat terlihat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil kolaborasi bersama antara DISPOP dengan pihak asosiasi usaha pariwisata dalam wujud regulasi, program kegiatan, event dan destinasi wisata baru. Sedangkan untuk evaluasi kolaborasi DISPOP dengan pihak asosiasi usaha pariwisata telah menginisiasi perbaikan dan penguatan yang sifatnya substantif dalam pengembangan pariwisata.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, Pariwisata, Pengelolaan

**ABSTRACT**

*This research is to find out how the Collaborative Governance process takes place in tourism management in Polewali Mandar district. This study uses a qualitative approach with a phenomenological type to find facts and results in the field. Government collaboration is divided into 3 processes, namely the dynamics of collaboration, collaborative actions, and the impact and adaptation of the collaboration process. Data collection through interviews, observation and documentation with the technique of determining informants using purposive sampling. The results show that (1) the dynamics of collaboration has motivational aspects which include mutual trust and understanding. Trust was built between the implementers of the collaborative process between DISPOP and the tourism business association, trust was also manifested from the attitude and mutual respect between the collaboration implementers. For shared understanding, it can be seen in how the collaboration implementers understand the main tasks and functions in tourism management. Meanwhile, on the principle aspect, DISPOP and the tourism business association developed the principles of community-based tourism management. (2) Collaborative actions in managing tourism in Polewali Mandar Regency in facilitating collaboration have not been maximized due to limited budgets, but that cannot be a reason for hampering collaborative actions. Meanwhile, to advance the collaboration process, it is very visible in the pattern of active communication that is built between DISPOP and the tourism business association. (3) The impact and adaptation to the collaborative process of tourism management in Polewali Mandar Regency can already be seen. This can be proven by the results of joint collaboration between DISPOP and tourism business associations in the form of regulations, activity programs, events and new tourist destinations. As for the evaluation of the DISPOP collaboration with the tourism business association, it has initiated substantive improvements and strengthening in tourism development.*

**.Keywords: Collaborative Governance, Tourism, Management.**

**PENDAHULUAN**

Kehidupan manusia terkadang melakukan perjalanan atau kegiatan bersantai disuatu tempat objek wisata yang dilakukan untuk menghilangkan rasa bosan, menghilangkan beban dan kepenatan dari rutinitas pekerjaan dengan menikmati pemandangan. Kegiatan tersebut oleh masyarakat dikenal dengan istilah sebagai kegiatan pariwisata. Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Spilane (dalam Susilawati 2016) mengemukakan bahwa, pariwisata merupakan suatu perjalanan dari suatu tempat ketempat yang lain bersifat kontemporer yang di lakukan individu atau kelompok sebagai usaha untuk menemukan suatu kebahagiaan, keseimbangan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Pariwisata memiliki sifat yang kompleks oleh karena itu dalam mengelola pariwisata perlu adanya kerjasama antara swasta, pemerintah maupun masyarakat agar pariwisata dapat berkembang secara baik dan memberikan manfaat bagi manusia.

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata dalam pasal 1 ayat 3, pariwisata adalah segala jenis aktivitas wisata dan didukung dengan segala fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, maupun pemerintah daerah. Pembangunan pariwisata mampu manggairahkan aktivitas bisnis untuk menghasilkan

manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara. Ketika pariwisata direncanakan dengan baik, mestinya akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada sebuah destinasi. Muncul dan berkembangnya kegiatan pada pariwisata tidak lain karena di wilayah tersebut terdapat objek yang spesifik dan unik sehingga memiliki daya tarik yang tidak ada di tempat lain sehingga menarik untuk dikunjungi. Sebagaimana diketahui bahwa wisata mempunyai hakekat keunikan, kekhasan, perbedaan, orisinalitas, keanekaragaman, dan kelokalan sehingga menarik banyak orang untuk melakukan perjalanan wisata. (Zaenuri; 2016).

Pendefinisian governance terlebih dahulu harus dijelaskan karena istilah collaborative governance lahir dari pengembangan konsep governance. Hal ini dilakukan agar dapat memenuhi pemaknaan yang lebih konkrit, sederhana dan tidak terjadi kerancuan bagi peneliti maupun pembaca. Istilah government dan governance sering ditemui Dalam studi Ilmu Pemerintahan, kedua istilah tersebut hampir serupa namun sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain.

Menurut Keban (2008), governance merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Oleh sebab itu, institusi kelembagaan yang berakitan dengan governance meliputi tiga domain yaitu state (negara atau pemerintah), society (masyarakat) dan private sector (sector dunia usaha) yang berinteraksi menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Tata kelola pemerintahan berkembang mengikuti dinamisme kebutuhan, collaborative governance (tata kelola pemerintahan kolaborasi) menjadi fenomena dan (trend) baru yang menarik (Zaenuri, 2016). Collaborative Governance merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemegang kepentingan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik, tujuannya untuk mendapatkan sumberdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan sesuai harapan para pemegang kepentingan tersebut. Sumber daya tersebut berada dan dimiliki oleh para pemegang kepentingan (Sambodo, 2016).

Istilah “governance” sebagai bentuk kata ganti dari “government”, pemahaman ini sangat umum ditemukan akan tetapi perlu dipahami bahwa “governance” bukanlah sinonim dari “government”. Governance memiliki perhatian terhadap pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, hal ini disebabkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya sudah semakin kompleks akan tantangan dan masalah yang dihadapi (Dwiyanto, 2005). Secara umum Governance dapat di pahami sebagai peralihan bentuk dari “penyelenggaraan kebijakan publik” tidak hanya pada berpusat pada pemerintah semata, namun turut melibatkan aktor – Aktor lain diluar struktur pemerintahan untuk berpartisipasi baik dari masyarakat, swasta, dan lainnya.

Dalam prakteknya proses kolaborasi berjalannya sebuah sistem, dimana dalam proses kolaborasi mewakili model perilaku yang mendominasi, aktivitas dan pengambilan keputusan. Dalam proses kolaborasi ini memiliki tiga variabel. Dimana dalam proses kolaborasi yang perlu diperhatikan antara lain yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi serta dampak dan adaptasi dalam proses kolaborasi.

Dinamika kolaborasi merupakan penggerak penting dalam proses kolaborasi. Pelaksanaan kolaborasi yang baik terdapat pada keterlibatan prinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk tindakan bersama. Tindakan-tindakan kolaborasi merupakan cerminan dari dinamika kolaborasi. Dimana tindakan-tindakan kolaborasi tidak bisa dicapai bila hanya dilakukan oleh satu organisasi saja yang melakukan tindakan. Hasil dari tindakan kolaborasi biasanya dilihat sebagai dampak sementara yang mengarah kembali kepada

dinamika kolaborasi. Dampak dan adaptasi dalam proses kolaborasi yaitu dampak yang ditimbulkan dari proses kolaborasi. Karakteristik dampak dalam proses kolaborasi ada yang diharapkan dan tidak diharapkan. Dampak tersebut dapat menghasilkan umpan balik yang kemudian di adaptasi oleh kolaborasi. (Balogh, dkk 2012).

Polewali Mandar sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki kondisi geografis yang lengkap yaitu daerah pegunungan, daerah pesisir dan gugusan pulau disebelah barat adalah sebuah potensi yang sangat luar biasa bagi sektor pariwisata, belum lagi Kabupaten Polewali Mandar didukung oleh budaya yang heterogen dari sisi etnisitas. Ada beberapa etnis yang mendiami wilayah Polewali mandar yakni; Mandar, Bugis, Pattae, dan Jawa.

Dari data yang dimiliki Asosiasi Usaha Pariwisata Di Kabupaten Polewali Mandar, ada sekitar 50 anggota yang terdiri dari; Asosiasi Usaha Pariwisata, Restoran, Hotel dan Ekonomi Kreatif. Saat ini hanya 50 % dari anggota asosiasi yang aktif dalam artian kembali mengembangkan usaha pariwisata setelah pandemic covid 19. Selain terkait berkurangnya usaha pariwisata yang aktif di Kabupaten Polewali Mandar dalam dua tahun terakhir yakni berkurangnya kunjungan wisatawan persentase penurunan sebesar 16,44% dengan jumlah 267.445 pada tahun 2020 dan 223.447 pada tahun 2021 (Balitbangren Polman).

Berdasarkan wawancara Ketua Asosiasi Usaha Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, Di dapatkan informasi bahwa telah ada kesepakatan dengan pihak dinas pemuda olahraga dan pariwisata untuk pengembangan destinasi wisata pada tahun 2022 dengan konsep kolaborasi dengan masyarakat, pelaku usaha pariwisata dan pemerintah. Namun kolaborasi yang dilakukan untuk saat ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena hanya pemerintah dan pelaku usaha pariwisata yang terlibat aktif sementara masyarakat tidak terlalu aktif dan masih kurangnya informasi serta upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga kolaborasi tidak berjalan dengan efektif.

Setidaknya ada 5 destinasi wisata kabupaten Polewali Mandar yang telah di kenal luas dan memiliki potensi sangat besar yakni Pulau Gusung Toraja, Kebun Raya Bulo, Gonda Mangrove Park, Permandian Alam Kanang, dan Rumah Penyu Mampie. Semua destinasi wisata diatas memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Namun dalam pengelolaannya masih mengalami kendala. Peran pemerintah daerah sebagai supervisor dalam pengembangan pariwisata belum maksimal dan menunjukkan keterbatasan dalam kapasitasnya mengelola pariwisata. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menjadi persoalan yang mendasar untuk mengembangkan sektor pariwisata. Karena untuk mengembangkan pantai bira dibutuhkan sumber daya yang memadai. Kondisi di atas menunjukkan bahwa perlu adanya peran aktif dari pemerintah dan non-pemerintah dalam melakukan kolaborasi agar pariwisata dapat dikelola dengan baik. Karena didalam Collaborative Governance, pemerintah dan non-pemerintah aktif berpartisipasi. Sehingga pariwisata dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan dan bisa memberikan manfaat.

Dari penjelasan diatas tersebut, maka dalam penelitian ini akan diuraikan collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten polewali mandar. Adapun terlibat dalam pengelolaan pariwisata tersebut adalah Dinas Pemuda olahraga dan pariwisata bersama Asosiasi Usaha Pariwisata. Dimana tiga proses dalam Collaborative Governance yaitu meliputi

- a) Dinamika Kolaborasi
- b) Tendakan-tindakan kolaborasi
- c) Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, perilaku birokrasi pemerintahan termasuk di Kabupaten Polewali Mandar sangat dipengaruhi interaksi antara unsur – unsur pembentuk perilaku birokrasi (Saputra, dkk 2021). Fokus deskripsi tulisan ini adalah proses kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Kabupaten polewali mandar dalam ini dinas pemuda

olahraga dan pariwisata dengan Asosiasi Usaha Pariwisata dalam mengelola pariwisata di kabupaten polewali mandar , dengan tiga indicator utama yaitu:

1. Dinamika kolaborasi merupakan penggerak penting dalam proses kolaborasi dan memiliki sifat yang beubah-ubah. Kolaborasi yang baik terdapat dinamika. Didalam dinamika kolaborasi berfokus pada motivasi dan prinsip bersama dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten polewali mandar.
2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi merupakan tindakan yang dilakukan dalam proses kolaborasi seperti tindakan memfasilitasi kegiatan lapangan dan memajukan proses kolaborasi guna membantu dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten polewali mandar.
3. Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi merupakan dampak yang ditimbulkan dari proses kolaborasi. Dampak tersebut dapat menghasilkan umpan balik yang kemudian di adaptasi dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten polewali mandar. Pada indicator ini hasil kolaborasi dan evaluasi kolaborasi akan eksplorasi lebih jauh.
4. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi : Perumusan kebijakan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Pelaksanaan kebijakan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pemuda, Bidang Olahraga, Bidang Usaha Pariwisata, Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata, UPTD Sport Center, dan UPTD Gusung Toraja. Dalam penelitian ini hanya bidang usaha pariwisata yang menjadi fokus.
5. Asosiasi Usaha Pariwisata adalah sebagai wadah berkumpulnya usaha pariwisata di kabupaten polewali mandar. Asosiasi ini bersifat independent sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan pariwisata.

## **METODE**

Pada penelitian kali ini, penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata. Kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan pariwisata. Sedangkan untuk tipe dalam penelitian ini adalah fenomenologi yang berfokus pada kolaborasi stakeholder dalam pengelolaan pariwisata. Tipe penelitian fenomenologi ini digunakan karena penelitian ingin mendapatkan gambaran serta informasi yang sejelas-jelasnya mengenai pelaksanaan pengelolaan pariwisata dalam bentuk collaborative governance. Terknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis

Teknik penentuan informan yang penulis gunakan adalah teknik penentuan informan sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam (Sugiyono , 2016). Daftar informan diharapkan penulis mendapatkan informasi yang tepat dalam penelitian ini serta dapat menjadikan unit analisis semakin keci dan lebih fokus. Berikut daftar infoman penelitian.

1. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.
2. Asosiasi Usaha Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.
3. Owner Cokelat Macoa.
4. Owner Mandar Expedition.
5. Pengelola Kebun Raya Bulu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara umum proses kolaborasi dengan menggunakan pendekatan Balogh dkk dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten polewali mandar telah terlaksana secara baik sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh pihak pelaksana kolaborasi. Pelaksana kolaborasi dalam konteks ini adalah dinas pemuda olahraga dan pariwisata kabupaten polewali mandar bersama asosiasi usaha pariwisata. Pendekatan Balogh dkk diinterpretasikan kedalam berbagai hal yang dapat memajukan pariwisata di kabupaten polewali mandar.

### **A. Dinamika Kolaborasi**

Dinamika kolaborasi yang terjadi meliputi aspek Motivasi dan Prinsip Bersama. Motivasi yang indicator turunannya berkaitan dengan kepercayaan dan pemahaman bersama. Kepercayaan yang terbangun antara dinas pemuda olahraga dan pariwisata dengan asosiasi usaha pariwisata terjadi karena komunikasi dan kerjasama yang intens selama beberapa tahun terakhir. Hal inilah yang menjadi dasar awal dari sebuah kolaborasi komunikasi dan kerjasama. Sedangkan untuk pemahaman bersama berkaitan dengan pemahaman akan tugas dan fungsi masing – masing antara pelaksana kolaborasi. Pemahaman ini sangat diperlukan untuk menghindari overlap atau tumpang tindih kewenangan.

Prinsip bersama yang baru coba dikembangkan oleh pihak pelaksana kolaborasi dinas pemuda olahraga dan pariwisata dengan asosiasi usaha pariwisata yakni membuka seluas – luasnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Pariwisata berbasis masyarakat dimulai dengan terbitnya regulasi tentang kepariwisataan. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor 8 tahun 2014 tentang rencana induk pengembangan pariwisata (RIPDA) kabupaten polewali mandar, yang memuat rencana jangka panjang pengembangan pariwisata dan Peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan, yang memuat tentang penyederhanaan izin operasional usaha pariwisata.

Dinamika kolaborasi pada dasarnya adalah siklus orientatif (Emerson, dkk 2012) yang senantiasa menjadi dasar dari proses yang akan dijalan selanjutnya. Dengan adanya beberapa dinamika kolaborasi tahapan tindakan kolaborasi juga terlaksana.

### **B. Tindakan Kolaborasi**

Pada praktek pelaksanaannya tindakan kolaborasi cukup bervariasi. Dalam penelitian ini tindakan kolaborasi indicator yang digunakan yakni memfasilitasi dan memajukan proses kolaborasi. Memfasilitasi bagi pemerintah adalah sebuah diksi yang menjelaskan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam konteks pengelolaan pariwisata di kabupaten polewali mandar pihak dinas pemuda olahraga dan pariwisata telah berusaha secara maksimal ditengah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Dengan keterbatasan itu tetap diupayakan secara maksimal untuk mendukung performa dari pihak asosiasi usaha pariwisata dalam pengelolaan destinasi wisata. Adapun upaya yang dilakukan dinas pemuda olahraga dan pariwisata yakni :

1. Memfasilitasi anggota asosiasi untuk mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi aturan kepariwisataan.

2. Mengalokasikan anggaran untuk pertemuan rutin untuk anggota asosiasi.
3. Mengakses bantuan untuk para pelaku usaha pariwisata, seperti bantuan Dana Alokasi Khusus dan Kredit Usaha Rakyat.
4. Memfasilitasi kerjasama dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi dan NGO internasional yang bergerak pada bidang pariwisata.

Upaya memfasilitasi yang dilakukan mendapatkan apresiasi dari asosiasi usaha pariwisata sebagai mitra strategis dari pemerintah membantu dalam inisiasi kegiatan tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Sedangkan memajukan proses kolaborasi dilakukan dengan cara membuka komunikasi dengan seluruh elemen pelaku pariwisata dan dengan mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten polewali mandar.

Tindakan kolaborasi merupakan cerminan nyata dari dinamika kolaborasi. Menurut Innes dan Booher dalam Emerson (2012) tindakan- tindakan kolaborasi merupakan hasil utama dari proses kolaborasi linier antara penyebab dan dampak yang diperoleh. Tindakan kolaborasi dilakukan oleh pihak pelaksana kolaborasi setelah memulai dinamika kolaborasi.

### **C. Dampak dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi**

Dalam penelitian ini dampak dan adaptasi merupakan bagian paling akhir dari proses kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten polewali mandar. Pada bagian ini hasil kolaborasi dan evaluasi kolaborasi menjadi hal krusial untuk menilai berhasilnya sebuah proses kolaborasi. Hasil kolaborasi antara dinas pemuda olahraga dan pariwisata dengan asosiasi usaha pariwisata dapat nilai sangat baik sebab mampu menghasilkan produk regulasi, kegiatan/program bersama dan membangun objek wisata baru. Yang menjadi catatan penting yakni adanya hasil kolaborasi dalam bentuk regulasi, hal ini dapat dikatakan sebuah bentuk prestasi dalam proses kolaborasi. Adapun regulasi yang dimaksud adalah :

1. Peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor 8 tahun 2014 tentang rencana induk pengembangan pariwisata (RIPDA) kabupaten polewali mandar, yang memuat rencana jangka panjang pengembangan pariwisata.
2. Peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan, yang memuat tentang penyederhanaan izin operasional usaha pariwisata.
3. Rancangan peraturan bupati tentang tarif/ biaya masuk destinasi wisata
4. Membentuk tim satuan tugas pariwisata. Bertugas untuk memantau dan mengidentifikasi objek wisata baru yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Sedangkan untuk evaluasi kolaborasi pemerintah daerah dalam hal ini dinas pemuda olahraga dan pariwisata dengan pihak asosiasi usaha pariwisata telah menginisiasi perbaikan dan penguatan yang sifatnya substantif dalam pengembangan pariwisata. Utamanya yang berkaitan dengan penambahan anggaran dan penguatan regulasi.

Dampak dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi pada akhirnya diharapkan dapat menjadi acuan keberhasilan kolaborasi. Dampak positif tentu akan menjadi permanen sedangkan dampak negative sifatnya sementara.

## KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa fokus peneliti pada kolaborasi pengelolaan pariwisata kabupaten polewali mandar maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinamika dalam kolaborasi pengelolaan pariwisata di kabupaten polewali mandar yang dilakukan dinas pemuda olahraga dan pariwisata dengan pihak asosiasi usaha pariwisata berjalan dan berlangsung dengan baik. Dalam dinamika kolaborasi ada aspek motivasi yang meliputi kepercayaan dan pemahaman bersama. Tebangun Kepercayaan antara pelaksana proses kolaborasi antara dinas pemuda olahraga dan pariwisata dengan pihak asosiasi usaha pariwisata, kepercayaan juga terwujud dari ada sikap dan sifat saling menghargai antara pelaksana kolaborasi. Untuk pemahaman bersama terlihat dalam bagaimana pelaksana kolaborasi memahami tugas dan fungsi utama dalam pengelolaan pariwisata. Sedangkan pada aspek prinsip bersama dinas pemuda olahraga dan pariwisata dengan pihak asosiasi usaha pariwisata mengembangkan prinsip pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.
2. Tindakan-tindakan kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten polewali mandar dalam memfasilitasi kolaborasi belum maksimal karena keterbatasan anggaran yang dimiliki, tetapi itu tidak dapat menjadi alasan terhambatnya tindakan kolaborasi. Sedangkan untuk memajukan proses kolaborasi sangat terlihat dalam pola komunikasi aktif yang dibangun antara dinas pemuda olahraga dan pariwisata dengan pihak asosiasi usaha pariwisata.
3. Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi pengelolaan pariwisata di kabupaten polewali mandar sudah dapat terlihat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil kolaborasi bersama antara dinas pemuda olahraga dan pariwisata dengan pihak asosiasi usaha pariwisata dalam wujud regulasi, program kegiatan, event dan destinasi wisata baru. Sedangkan untuk evaluasi kolaborasi dinas pemuda olahraga dan pariwisata dengan pihak asosiasi usaha pariwisata telah menginisiasi perbaikan dan penguatan yang sifatnya substantif dalam pengembangan pariwisata.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Collaborative Governance dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten polewali mandar, oleh karena itu peneliti menyarankan:

1. Mendorong dinas pemuda olahraga dan pariwisata untuk memperjuangkan penambahan anggaran, terutama untuk perbaikan akses jalan menuju destinasi wisata.
2. Mendorong kolaborasi antar dinas untuk mengurangi ego sektoral dalam pembangunan. Sebab pengembangan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri.
3. Mendorong dinas pemuda olahraga dan pariwisata bersama asosiasi usaha pariwisata memperluas jaringan yang berkaitan dengan usaha dan promosi pariwisata.
4. Memperkuat peraturan daerah dengan penerbitan peraturan bupati untuk mendukung regulasi yang ada sebelumnya.
5. Mendorong perluasan ragam/jenis usaha pariwisata.

### DAFTAR PUSTAKA

- Balitabangren Dokumen Musrebang Kabupaten Polewali Mandar, tahun 2022
- Balogh, dkk. 2012. An Iterative Framework for Collaborative Governance, *Journal of Public Administration Research and Theory*
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan "Good Governance" Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi and Stephen Balogh (2012), 'An integrative framework for collaborative governance', *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Keban, Jeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Sambodo Giat Tri. 2016. "pelaksanaan collaborative governance di desa budaya brotot, galur, kulonprogo, DIY", *Jurnal ilmu pemerintahan dan kebijakan publik*. Vol.3 No.1